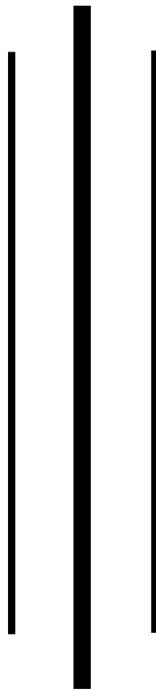




**RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara) Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

- (3) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 39 Seri D

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KE RJA	
DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	17
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Dinas Tenaga Kerja	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP	72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

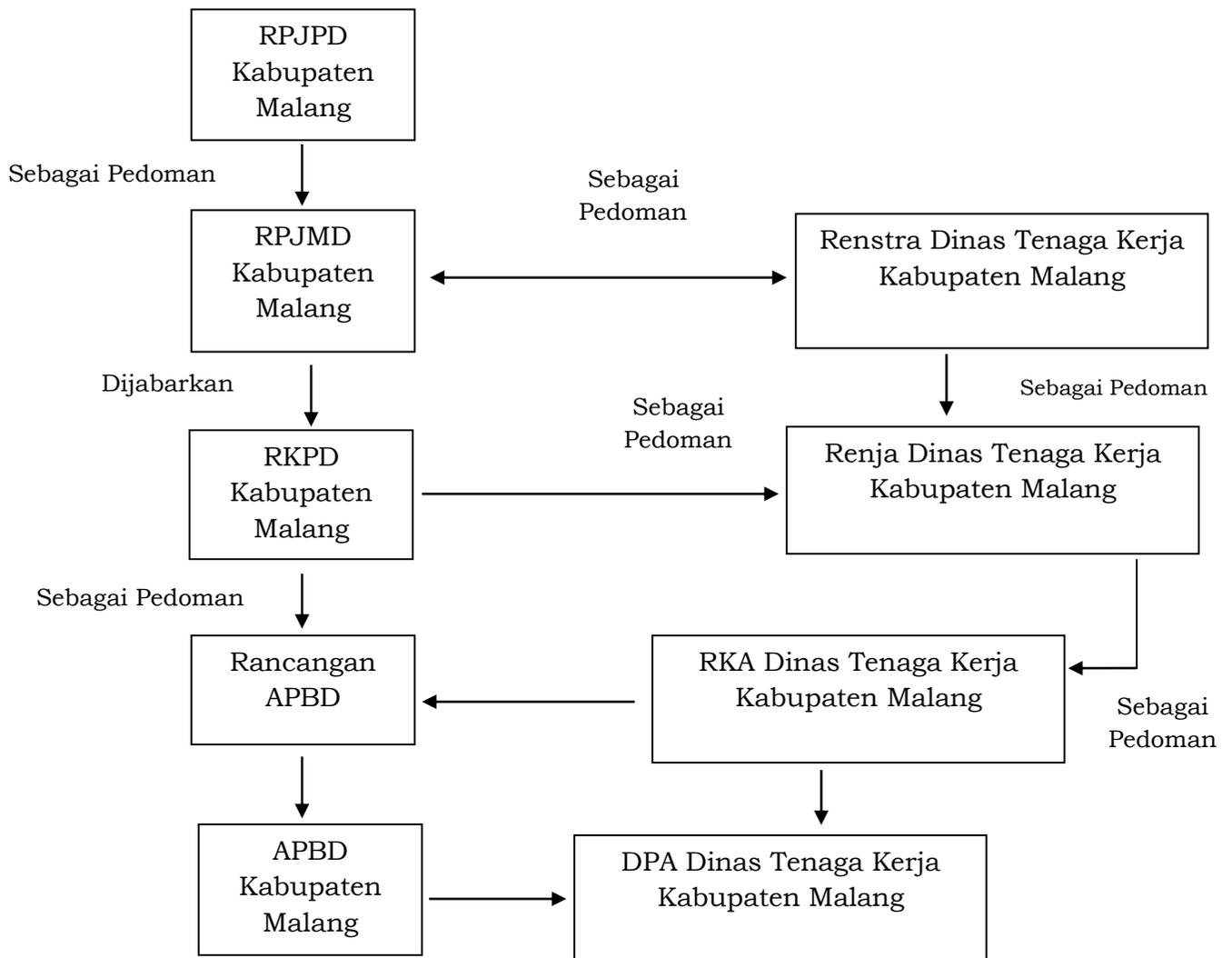
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja berpedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk

mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendukung Misi ke-5 Bupati Malang yaitu “Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 18 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/743/KEP/35.07.013/2018 tentang Peubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/633/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/62/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selama Tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah :

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan

- dengan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja;
2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
 3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dan 30 kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja memiliki Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi, berikut program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
6. Program Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
9. Program Ketransmigrasian

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Capaian Renstra tersaji dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra
Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2019**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 buah	6682 Surat	7500 buah	9776 buah	89.09%	7500 buah	17276 buah	63,03%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Bulan	4 rekening *)	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	33% *)
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	66,67%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	147 Unit	49 Unit	62 unit	62 unit	100%	49 unit	111 Unit	66,67%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	45 Jenis	15 item	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	30 jenis	66,67%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	204 jenis	68 buah *)	68 jenis	96 jenis	100%	68 jenis	164 jenis	66,67% *)
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	27 Unit	9 Unit	51 unit	51 unit	100%	9 unit	60 Unit	66,67%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan Bacaan dan	36 Bulan	36 exemplar	36 jenis	36 jenis	100%	12 Bulan	12 Bulan *)	33% *)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
		Tepat Waktu (%)								
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	1 Buku	1 buku	251 buku*)	100%	1 Buku	252 Buku	- *)
17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 Buku	2 Buku	2 buku	1 buku	100%	1 Buku	3 Buku	33%
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	1 Buku	1 buku	1 buku	100%	1 Buku	3 Buku	100%
V	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	-	100%	-	-	-	-	100%	- *)
21	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	-	264 orang	-	-	-	-	264 orang	- *)
VI	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	-	-	264 orang	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
	Mengentas kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi									
23	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 orang	-	324 Orang	324 Orang	100%	500 Orang	824 orang	100% *)
24	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 orang	-	264 orang	264 orang	100 %	264 orang	528 orang	100%
26	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	340 orang	-	340 orang	264 orang	77.64%	340 orang	604 orang	100% *)
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	-	380 orang	-	-	-	-	-	-
28	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	120 orang	-	40 orang	-	-	40 orang	80 orang	33%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
29	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	720 orang	380 orang	290 orang	290 orang	100%	240 Orang	910 orang	100% *)
VIII	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	3 Rekom	1 Rekom	1 rekom	1 rekom	100%	1 Rekom	3 Rekom	100%
31	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IX	Program Ketransmigrasian	Presentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	3 lokasi	3 lokasi	1 lokasi	33%	3 lokasi	7 lokasi	100% *)
34	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	5 KK	5 KK	2 KK	40%	5 KK	12 KK	100%
35	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	560 orang	560 orang	480 orang	85%	560 orang	1600 orang	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode renstra Disnaker)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (10/4)
36	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	15 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	45 orang	100%

Keterangan Tabel 2.1 :**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun 2017 menggunakan satuan surat dan mulai tahun 2018 menggunakan satuan buah. Tetapi hal ini dibisa dihitung berapa surat masuk dan keluar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2017 di hitung berdasarkan jumlah rekening yang dibayar setiap bulan sedangkan mulai tahun 2018 sudah menggunakan indikator baru yaitu bulan.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2017 menggunakan indikator item dan mulai tahun 2018 menggunakan satuan jenis.
- Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2017 menggunakan indikator buah dan mulai tahun 2018 menggunakan satuan jenis.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2017 indikatornya berdasarkan exemplar. Sedangkan untuk tahun 2018 sudah menggunakan indikator baru yaitu jenis dan untuk 2019 indikatornya berdasarkan bulan sehingga tidak dapat di ukur realisasi kinerjanya.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada tahun 2017 menggunakan indikator orang akan tetapi pada tahun 2018 menggunakan indikator bulan. Sehingga realisasi capaian 2018 indikator kinerjanya tidak dapat ukur.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah pada tahun 2017 menggunakan indikator orang akan tetapi pada tahun 2018 menggunakan indikator bulan. Sehingga realisasi capaian 2018 indikator kinerjanya tidak dapat ukur.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tahun 2017 menggunakan indikator paket dan 2018 menggunakan indikator jenis.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2018 ditargetkan 1 buku namun pada saat PAK 2018 terealisasi 251 buku

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tidak tercantum pada renstra dan renja 2018 tetapi muncul pada dokumen DPA 2018.

3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Dinas Tenaga Kerja mendapat dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sehingga untuk tahun 2017 tidak dapat diukur kinerjanya karena baru ada di tahun 2018. Pada Kegiatan ini telah diadakan perubahan nama kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil yaitu menjadi Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Kegiatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja pada Dinas Tenaga Kerja mendapat dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau baru ada ditahun 2018, sehingga tidak dapat diukur kinerjanya pada tahun 2017.
- Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak dapat diukur kinerjanya pada tahun 2017, karena kegiatan tersebut baru ada ditahun 2018, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil dengan merubah nama kegiatan menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keteram[ilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan. SPM ini diperuntukkan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar

cccPelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan untuk SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja di tahun 2018 teralisasi menjadi program yaitu :

1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang berdasarkan Indikator SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara lengkap diuraikan pada table 2.2

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi				Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	7500 Buah	7500 Buah	7500 Buah	7500 Buah	7500 Surat	7500 Surat	7500 Surat	7500 surat			
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan				
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit				
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Item	15 Item	15 Item				
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	95 Buah	68 Buah	68 Buah	68 Buah	95 Buah	68 Buah	68 Buah	68 Buah			
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit			
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
9.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
10.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi			Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
19.	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20.	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
21.	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	-	-	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		
VI.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22.	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	-	-	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	264 Orang	264 Orang	264 Orang	xxx		
23.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	-	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang		
24.	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	300 Orang	340 Orang	340 Orang		300 Orang	340 Orang	340 Orang	xxx		
VII.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		
25.	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	-	-	0 Orang	0 Orang	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0 Orang			
26.	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja	-	-	40 Orang	40	40		40 Orang	40 Orang	40			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -	Proyeksi				Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	Hasil Industri				Orang	Orang				Orang			
27.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	-	-	240 Orang	240 Orang	240 Orang		240 Orang	240 Orang	240 Orang			
VIII.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%			
28.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	1 Rekom	1 Rekom	1 Rekom		1 Rekom	1 Rekom	1 Rekom			
29.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%			
IX.	Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal	-	-	100%	100%	100%		100%	100%	100%			
30.	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	-	-	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi			
31.	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	-	-	5 KK	5 KK	5 KK		5 KK	5 KK	5 KK			
32.	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	-	-	560 Orang	560 Orang	560 Orang		560 Orang	560 Orang	560 Orang			
33.	Pelatihan Transmigrasi Lokal	-	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang	15 Orang			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Berdasarkan Analisis dan evaluasi atas kondisi dalam saat ini, permasalahan dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- b. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri;
- c. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

Adanya permasalahan yang tersebut dikarenakan terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu :

- a. Pelaksanaan program yang belum optimal;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik;
- d. Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal.

Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).

1. Ancaman (Threat)
 - a. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ;
 - b. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ;

- c. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

2. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kewenangan otonomi bidang ketenagakerjaan ;
- b. Kesempatan kerja di luar negeri terbuka luas ;
- c. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan teknis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ;
- d. Tersedianya Lembaga Pelatihan (Pemerintah/Swasta) yang menyelenggarakan pelatihan kerja ;
- e. Terbukanya kerjasama antar dinas/instansi pusat dan daerah serta dengan provinsi lain di bidang ketenagakerjaan.

Dirumuskan beberapa isu strategis yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan isu-isu strategis pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas angkatan kerja ;
- b. Pengurangan pengangguran ;
- c. Peningkatan SDM Calon Transmigran ;
- d. Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan ;
- e. Peningkatan jumlah penempatan ;
- f. Peningkatan jumlah pembentukan LKS Bipartit serta Tripartit ;
- g. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten ;
- h. Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan ;
- i. Peningkatan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan ;
- j. Peningkatan SDM Aparatur ;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana bekerja ;
- l. Peningkatan ketersediaannya informasi ketenagakerjaan serta perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD Tahun 2020 secara rinci disajikan dalam tabel 2.4. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD tahun 2020 Kabupaten Malang

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					7.267.491.675,00						7.267.491.675,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.639.583.175,00						6.676.368.375,00	
2.201	TENAGA KERJA				6.639.583.175,00						6.676.368.375,00	
2.201.15	DINAS TENAGA KERJA				6.639.583.175,00						6.676.368.375,00	
2.201.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.058.458.101,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.822.851.275,00	
2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Tenaga Kerja	7500 buah	299.556.580,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Tenaga Kerja	7500 buah	3.675.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	26.460.929,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	32.680.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	108.293.801,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	828.195.365,60	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(OB)										
2.201.15.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	49 Unit	21.426.002,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	44 Unit	19.900.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	15 Jenis	56.737.254,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	11 Jenis	53.741.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	68 Jenis	3.577.126,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	46 Jenis	4.748.500,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	9 Unit	129.242.037,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	84.000.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	116.134.076,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	108.760.000,00	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Undangan	Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)					Undangan	Undangan yang disediakan (jenis)				
2.201.15.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	107.405.645,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	521.540.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	139.189.386,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	100.860.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	50.435.265,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	64.751.409,40	APBD Kabupaten
2.201.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	54.940.728,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	75.364.800,00	
2.201.15.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Tenaga Kerja	1 Jenis	32.595.944,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Tenaga Kerja	1 Jenis	49.344.800,00	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.201.15.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	22.344.784,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	11 Unit	26.020.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	3.675.129,00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.000.000,00	
2.201.15.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Tenaga Kerja	3 Orang	3.675.129,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Tenaga Kerja	4 Orang	4.000.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	8.162.217,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	43.010.000,00	

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.201.15.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	5.678.074,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	150 Buku	40.490.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	2 Buku	1.496.758,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	1.260.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	987.385,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	1.260.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.05	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)		100%	287.650.000,00		PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)		100%	300.000.000,00	
2.201.15.05.01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	100%	287.650.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	100%	300.000.000,00	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		lembaga penyalur tenaga kerja						penyalur tenaga kerja				
2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)		100%	786.015.500,00		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)		100%	786.015.500,00	
2.201.15.06.01	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang	40 Orang	108.172.500,00	APBD Kabupaten	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	Di salah satu hotel di Kabupaten Malang	40 Orang	108.172.500,00	APBD Kabupaten
2.201.15.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumber manjing Wetan	240 Orang	677.843.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Di salah satu hotel atau Instansi Pemerintah di Kabupaten Malang	240 Orang	677.843.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN	Persentase terlaksananya Program		100%	1.216.594.500,00		PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN	Persentase terlaksananya Program		100%	1.145.126.800,00	

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)					INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)				
2.201.15.07.01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	1 Rekom	824.116.500,00	APBD Kabupaten	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	Perusahaan di Wilayah Kabupaten Malang	1 Rekom	620.126.800,00	APBD Kabupaten
2.201.15.07.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksannnya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	100%	267.478.000,00	APBD Kabupaten	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksannnya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	100%	350.000.000,00	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.201.15.07.03	Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketegakerjaan	Terfasilitasinya Lembaga Hubungan Industrial pada Perusahaan	Kabupaten Malang	2 Lembaga	125.000.000,00	APBD Kabupaten	Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketegakerjaan	Terfasilitasinya Lembaga Hubungan Industrial pada Perusahaan	Desa Taman Asri Kec. Ampelading dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	2 Lembaga	175.000.000,00	APBD Kabupaten
2.201.15.08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial		100%	3.224.087.000,00		PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial		100%	2.500.000.000,00	
2.201.15.08.01	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	500 Orang	329.782.000,00	DBHCHT	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	500 Orang	500.000.000,00	DBHCHT (Blockgrant)
2.201.15.08.02	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran	264 Orang	1.070.000.000,00	DBHCHT	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan di wilayah	264 Orang	1.000.000.000,00	DBHCHT (Blockgrant)

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah						Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Kabupaten Malang			
2.201.15.08.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kecamatan di Kabupaten Malang	340 Orang	1.824.305.000,00	DBHCHT	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	340 Orang	1.000.000.000,00	DBHCHT (Blockgrant)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				627.908.500,00		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				591.123.300,00	
3.306	TRANSMIGRASI				627.908.500,00		TRANSMIGRASI				591.123.300,00	
3.306.15	DINAS TENAGA KERJA				627.908.500,00		DINAS TENAGA KERJA				591.123.300,00	
3.306.15.01	PROGRAM KETRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi		100%	627.908.500,00		PROGRAM KETRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi		100%	591.123.300,00	
3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi,	Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	152.706.500,00	APBD Kabupaten	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	2 Wilayah di Indonesia	2 Lokasi	138.704.000,00	APBD Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Hasil Analisis Kebutuhan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kawasan	Sumatera dan Kalimantan					Kawasan					
3.306.15.01.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	5 KK	210.021.000,00	APBD Kabupaten	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	5 KK	237.526.400,00	APBD Kabupaten
3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Sumber manjing Wetan	560 Orang	147.311.000,00	APBD Kabupaten	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	480 Orang	130.221.000,00	APBD Kabupaten
3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	Kecamatan Pojun, Kecamatan Sumber manjing Wetan	15 Orang	117.870.000,00	APBD Kabupaten	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	15 Orang	84.671.900,00	APBD Kabupaten

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2020

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja				
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial	Wilayah Kabupaten Malang	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK		
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Desa Taman Asri Kec. Ampelgading	Terfasilitasinya Keikutsertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Para Pekerja Formal dan Informal	5 Orang	
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				
	Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dan Masyarakat	Kecamatan Gondanglegi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	30 Orang	
	Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Untuk Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kecamatan Gondanglegi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	88 orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional maupun daerah adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya. Kurangnya kualitas yang dimiliki oleh para pencari kerja disebabkan oleh pembangunan di desa kurang optimal. Terkait dengan hal tersebut, sesuai misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Malang, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja adalah :

“Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa”

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih. Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menurunkan jumlah pengangguran di desa
2. Menyerap tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja
3. Penempatan calon transmigran.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2016-2021 adalah

menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Malang dengan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam program kerja dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. *Program Perluasan dan Kesempatan Kerja*, dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja;
6. *Program Pembinaan Lingkungan Sosial*, dengan kegiatan :
 - a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Padat Karya yang dapat mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (POKIR)
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja;
 - c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat. (PUG dan POKIR)
7. *Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja*, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (POKIR)
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (POKIR)
8. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dengan kegiatan :
 - a. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
9. *Program Ketrasmigrasian* dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan ;
 - b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM ;
 - c. Penyuluhan Transmigrasi Lokal ;
 - d. Pelatihan Transmigrasi Lokal.

Secara lengkap, penjelasan mengenai program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7.267.491.675,00				7.701.327.707,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.676.368.375,00				7.029.455.707,00	
2.201	TENAGA KERJA				6.676.368.375,00				7.029.455.707,00	
2.201.15	DINAS TENAGA KERJA				6.676.368.375,00				7.029.455.707,00	
2.201.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.822.851.275,00			100%	1.132.550.167,00	
2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Tenaga Kerja	7500 buah	3.675.000,00	APBD Kabupaten		7500 buah	320.525.540,00	
2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	32.680.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	28.313.194,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)								
2.201.15.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	828.195.365,60	APBD Kabupaten		12 Bulan	115.874.367,00	
2.201.15.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	44 Unit	19.900.000,00	APBD Kabupaten		49 Unit	22.925.822,00	
2.201.15.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	11 Jenis	53.741.000,00	APBD Kabupaten		15 Jenis	60.708.862,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	46 Jenis	4.748.500,00	APBD Kabupaten		68 Jenis	3.827.524,00	
2.201.15.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	8 Unit	84.000.000,00	APBD Kabupaten		9 Unit	138.288.979,00	
2.201.15.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	108.760.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	124.263.462,00	
2.201.15.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan	Jumlah pegawai	Dinas Tenaga	12 Bulan	521.540.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	114.924.040,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Konsultasi Ke Luar Daerah	memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kerja							
2.201.15.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	100.860.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	148.932.643,00	
2.201.15.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	64.751.409,40	APBD Kabupaten		12 Bulan	53.965.734,00	
2.201.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	75.364.800,00			100%	58.786.579,00	
2.201.15.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang	Dinas Tenaga Kerja	1 Jenis	49.344.800,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	34.877.660,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dipelihara Rutin/Berkala (jenis)								
2.201.15.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Tenaga Kerja	11 Unit	26.020.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	23.908.919,00	
2.201.15.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	4.000.000,00			100%	3.932.388,00	
2.201.15.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Dinas Tenaga Kerja	4 Orang	4.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Orang	3.932.388,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan , Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	43.010.000,00			100%	8.733.573,00	
2.201.15.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	150 Buku	40.490.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	6.075.540,00	
2.201.15.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	1.260.000,00	APBD Kabupaten		2 Buku	1.601.531,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan semester II (Buku)								
2.201.15.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Tenaga Kerja	1 Buku	1.260.000,00	APBD Kabupaten		1 Buku	1.056.502,00	
2.201.15.05	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)		100%	300.000.000,00			100%	307.785.000,00	
2.201.15.05.01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang	100%	300.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	307.785.000,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)		100%	786.015.500,00			100%	841.038.000,00	
2.201.15.06.01	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	Di salah satu hotel di Kabupaten Malang	40 Orang	108.172.500,00	APBD Kabupaten		40 Orang	115.746.000,00	
2.201.15.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Di salah satu hotel atau Instansi Pemerintah di Kabupaten Malang	240 Orang	677.843.000,00	APBD Kabupaten		240 Orang	725.292.000,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)		100%	1.145.126.800,00			100%	1.301.756.000,00	
2.201.15.07.01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	Perusahaan di Wilayah Kabupaten Malang	1 Rekom	620.126.800,00	APBD Kabupaten		1 Rekom	865.555.000,00	POKIR
2.201.15.07.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salah satu hotel di Kabupaten Malang	100%	350.000.000,00	APBD Kabupaten		100%	286.201.000,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.07.03	Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketegakerjaan	Terfasilitasi nya Lembaga Hubungan Industrial pada Perusahaan	Desa Taman Asri Kec. Ampelgading dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	2 Lembaga	175.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Lembaga	150.000.000,00	POKIR
2.201.15.08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial		100%	2.500.000.000,00			100%	3.374.874.000,00	
2.201.15.08.01	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kab. Malang	500 Orang	500.000.000,00	DBHCHT		500 Orang	352.867.000,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.201.15.08.02	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan diwilayah Kabupaten Malang	264 Orang	1.000.000.000,00	DBHCHT		264 Orang	1.070.000.000,00	POKIR
2.201.15.08.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan diwilayah Kabupaten Malang	340 Orang	1.000.000.000,00	DBHCHT		340 Orang	1.952.007.000,00	PUG POKIR
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				591.123.300,00			671.872.000,00		

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.306	TRANSMIGRASI				591.123.300,00				671.872.000,00	
3.306.15	DINAS TENAGA KERJA				591.123.300,00				671.872.000,00	
3.306.15.01	PROGRAM KETRANSMIGRASI AN	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi		100%	591.123.300,00			100%	671.872.000,00	
3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	2 Wilayah di Indonesia	2 Lokasi	138.704.000,00	APBD Kabupaten		2 Lokasi	163.396.000,00	
3.306.15.01.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	5 KK	237.526.400,00	APBD Kabupaten		5 KK	224.732.000,00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Cat.	Prakiraan Maju Tahun 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	480 Orang	130.221.000,00	APBD Kabupaten		400 Orang	157.623.000,00	
3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang	15 Orang	84.671.900,00	APBD Kabupaten		15 Orang	126.121.000,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.



CASCADING / POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2020

